

ANALISA CROSSCUTTING DP3APPKB 2025

COURT ROLE AND STRUCTURE

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Dalam beberapa kajian belakangan ini metode crosscutting dalam manajemen kinerja dinilai *urgent* karena struktur piramid kinerja ataupun pohon kinerja terbatas pada struktur hirarki internal yang efektif untuk menunjukan siapa, berbuat apa secara hirarki kinerja, namun pada beberapa kasus, kinerja sangat dipengaruhi dan mempengaruhi lintas fungsi di luar hirarki struktur.

Merujuk pada Jacques Lemonnier (2014) dalam bukunya *"The Cross-Cutting Manager"*, disampaikan *"that the cross-cutting management is exercised horizontally and not vertically, which implies that it is not a priori based on a hierarchical link, and that it is generally "trans-trades, trans-departments, trans-poles" and therefore cross-cultures"*. Analisa Cross cutting memungkinkan membaca kinerja yang berlintangan dan beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Isu strategis khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin dinamis dan rumit maka relevan upaya identifikasi melalui cross cutting kinerja dilakukan demi efektifitas dan efesiensi pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan, upaya ini pun mendorong pemangku kebijakan pada tingkat

Perangkat Daerah untuk memahami lingkup pekerjaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang diampunya.

II. PEMBAHASAN ANALISA CROSSCUTTING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 memiliki sasaran strategis berjumlah 4 (empat) dengan 8 indikator yang mendukung kinerja sasaran. Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan /aspek *cross cutting* sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan/Aspek	Unit Kerja
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan implementasi PUG termasuk ARG pada Pemerintah Daerah	DP3APPKB, BappedaLitbang, Inspektorat, BPKPAD
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB, Darmawanita, GOW, Inspektorat, BPKPAD
2.	Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	3. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	DP3APPKB, Disdik, Depag, Polres, Kecamatan, Dinkes, Kemen PPPA
			Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB, HIMPSI, RSUD, Unit PPPA Polres, Kecamatan, Satpol PP, DinSosPM, Universitas Borneo, Kemen PPPA
			Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan	DP3APPKB, Disdik, Depag, Polres,

			Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Dinkes, Kemen PPPA
		4. Rasio Kekerasan terhadap Anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota	DP3APPKB, Disdik, Depag, Polres, Kecamatan, Dinkes, Kemen PPPA
			Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB, HIMPSI, RSUD, Unit PPPA Polres, Kecamatan, Satpol PP, DinSosPM, Universitas Borneo, Kemen PPPA
			Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB, Disdik, Depag, Polres, Kecamatan, Dinkes, Kemen PPPA
3.	Meningkatnya Akseptor KB	5. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Meningkatkan upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Disdik, Kecamatan, BPS, BappedaLitbang, Departemen Agama, Diskominfo, BKKBN Kaltim
		6. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	RSUD, Dinkes, TNI, Departemen Agama, Dokter Swasta, Bidan Swasta, Kecamatan, BKKBN Kaltim, Polri, DP3PPKB
			Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DinsosPM, Dinkes, DPUPR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, BappedaLitbang, Kecamatan, DP3APPKB
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7. Nilai SAKIP 8. Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur	BKPSDM

			Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dinas	BappedaLitbang, BPKPAD, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda
--	--	--	--	--

CROSS CUTTING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2025

Meningkatkan implementasi PUG termasuk ARG pada Pemerintah Daerah			
DP3APPKB	Inspektorat	BPKPAD	Bappeda Litbang

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
DP3APPKB	Inspektorat	BPKPAD	Bappeda Litbang	Dharma Wanita	Gabungan Organisasi Wanita



Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga
Indikator Kinerja: 1. IPG 2. IDG

CROSS CUTTING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lingkup daerah kabupaten/kota					
DP3APPKB	Dinas Pendidikan	POLRI	Kecamatan	Departemen Agama	Dinas Kesehatan

Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
DP3APPKB	Dinas Pendidikan	POLRI	Kecamatan	Departemen Agama	Dinas Kesehatan

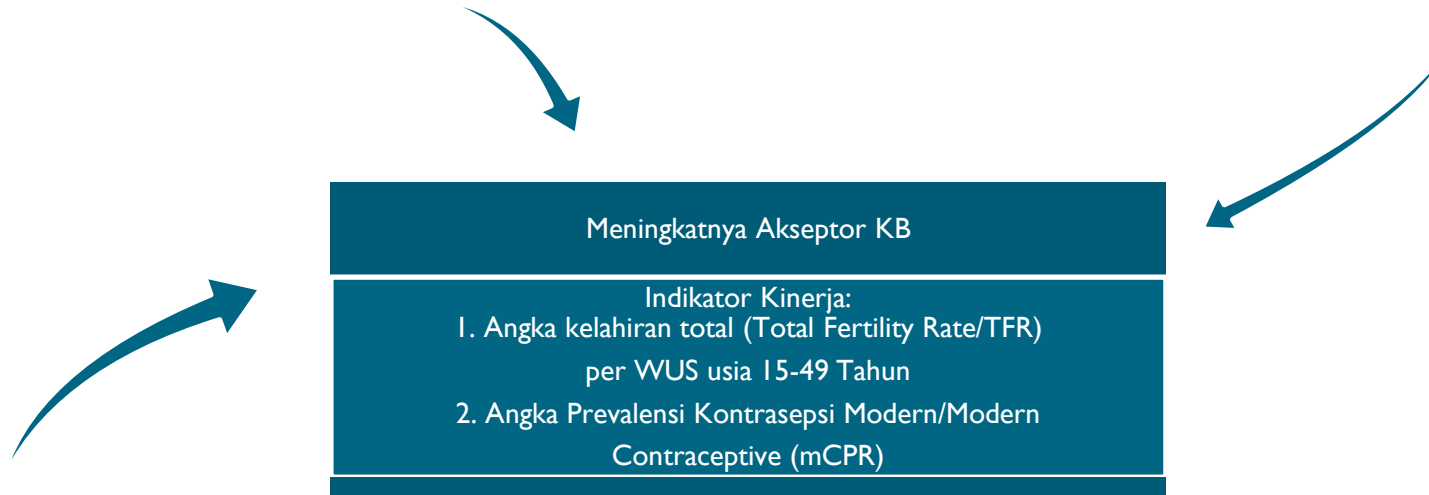
Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak
Indikator Kinerja: 1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)

Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
Dinas Pendidikan	Ormas Keagamaan	BASN AS	Kecamatan	Departemen Agama	POLRI	HIMPSI	Satpol PP	Univ. Borneo	RSUD Prov. Kaltara	DP3APPKB	Dinsos PM

CROSS CUTTING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

Meningkatkan upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Dinas Pendidikan	Kecamatan	Badan Pusat Statistik	Departemen Agama	Diskominfo dan Persandian	BKKBN Prov. Kaltim	Bappeda Litbang

Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
RSUD Prov. Kaltara	Kecamatan	Departemen Agama	Dinas Kesehatan	TNI	BKKBN Prov. Kaltim	Dokter swasta	Bidan swasta	POLRI



Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
DPUPR	Kecamatan	Departemen Agama	Dinas Kesehatan	Dinas Perikanan	BKKBN Prov. Kaltim	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Bappeda Litbang	Dinsos PM

CROSS CUTTING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dinas			
BKPAD	BappedaLitbang	Inspektorat	Bagian Organisasi Setda



Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur
BKPSDM



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

1. Nilai SAKIP

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

III. PENUTUP

Berdasarkan Analisa Crosscutting Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja di pegaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses pendukung dari eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan, hal ini menunjukan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain.

Kendati sinergitas kinerja telah dilaksanakan dengan baik, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan sinergitas kinerja yang berdampak pada hasil, agar stake holder pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan yang memangku kinerja terkait terus memperkuat koordinasi dengan unit kerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efesien agar mencermati hal-hal kebijakan/aspek yang beririsan atau telah dilaksanakan oleh unit kerja lain sehingga dapat dihindari adanya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan dengan output yang sama (*double* pekerjaan/kegiatan). Hal lain yang harus terus diupayakan adalah melakukan kegiatan bersama secara efektif diantaranya dengan melakukan event perencanaan lingkup pekerjaan yang sekaligus melibatkan pihak -pihak terkait, tidak melakukan perencanaan secara mandiri di setiap pihak.

Tarakan, Januari 2025

Mengetahui

Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan

The image shows a circular official stamp of the Dinas DP3APPKB Kota Tarakan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001

